

Hak Sipil dan Politik selama Pandemi COVID-19: LBH Yogyakarta

- **Judul Proyek**

Hak Sipil dan Politik selama Pandemi COVID-19

- **Subjudul**

Memperkuat masyarakat sipil dan menyebarluaskan narasi tentang hak-hak sipil untuk memengaruhi perspektif publik dan pemerintah terkait kebebasan sipil selama pandemi.

- **Ringkasan Eksekutif**

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus pelanggaran HAM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Negara (dalam hal ini pemerintah daerah dan petugas penegak hukum setempat) acap kali melakukan tindakan represi, persekusi, dan intimidasi. Situasi ini diperburuk dengan munculnya wabah COVID-19. Pemerintah acap kali memberlakukan pembatasan sipil, dengan alasan mencegah potensi penyebaran COVID-19. Meskipun memang dimungkinkan membatasi hak untuk alasan kesehatan, praktiknya di Yogyakarta cukup sewenang-wenang. Pemerintah bahkan tidak memberikan solusi untuk meminimalkan dampak pandemi pada kelompok minoritas dan masyarakat yang rentan.

Selama pandemi, kami melihat berbagai pembatasan terhadap ruang sipil di Yogyakarta, dan ini memengaruhi masyarakat sipil di lintas sektor dan aktor. Contohnya mencakup:

- 1) Solidaritas Pangan Jogja, sebuah inisiatif dapur darurat yang dikelola oleh masyarakat, didatangi–dan diawasi–oleh polisi.
- 2) Rapat evaluasi terkait pembagian makanan dan masker yang diadakan oleh sekelompok masyarakat sipil di kantor WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dibubarkan oleh pihak yang berwajib.
- 3) Represi oleh polisi dalam berbagai demonstrasi menentang Undang-Undang Ciptaker di Malioboro.
- 4) Diterbitkannya Peraturan Gubernur DIY No. 1/2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.
- 5) Demonstrasi untuk memperingati Hari Perempuan Sedunia di depan kantor Gubernur Yogyakarta dibubarkan oleh sekelompok oknum.
- 6) Beberapa demonstran juga menjadi korban kekerasan.
- 7) Kelompok transgender di Yogyakarta tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah terkait dampak COVID-19.

Proyek ini bertujuan untuk turut mengupayakan perubahan dan perbaikan pada berbagai kebijakan agar tidak lagi membatasi hak-hak sipil dengan dalih pandemi. Kami mendorong pemerintah untuk menyelesaikan akar masalahnya, yaitu bagaimana mereka akan menangani wabah serius. Dengan memperkuat gerakan masyarakat sipil yang memiliki perspektif HAM



dan keterampilan advokasi yang mumpuni, kami berupaya memengaruhi pemerintah untuk mengurangi kebijakan yang melanggar atau membatasi hak-hak sipil selama pandemi COVID-19 di Yogyakarta.

- **Deskripsi Proyek**

Ada empat aspek utama dalam proyek ini:

1. **Lokakarya demokrasi dan HAM dengan masyarakat sipil di Yogyakarta.**
 - Menghimpun berbagai aktor dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak selama pandemi.
2. **Penelitian tentang keikutsertaan masyarakat secara politis dalam perumusan kebijakan terkait penanganan COVID-19 di Yogyakarta.**
 - Penelitian dilakukan untuk menganalisis bagaimana pemerintah menangani pandemi dan menawarkan kebijakan alternatif untuk pendekatan yang berpusat pada hak.
3. **Sosialisasi narasi tentang hak-hak sipil melalui berbagai siniar (*podcast*).**
 - Menyalurkan pengetahuan yang diperoleh untuk merumuskan strategi advokasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban serta pendekatan penanganan COVID-19 yang menghormati hak-hak masyarakat.
4. **Gugatan warga.**
 - Mengumpulkan semua aspek untuk melakukan gugatan warga terhadap pemerintah setempat.

Studi kasus ini akan menilai dampak proyek, pelajaran yang diperoleh, hasil, dan tantangannya.

Tantangan dan tujuan.

Tantangan utama yang dihadapi adalah setelah melaporkan penelitian kami pada bulan Oktober, situasi mulai stabil. Pada bulan November, pemerintah menggalakkan vaksinasi sehingga terjadi penurunan jumlah pasien rawat inap dan kematian. Pada bulan Desember, kami melihat ruang sipil sudah mulai dibuka. Oleh karena itu, gugatan warga terhadap pemerintah sebagai aktivitas terakhir kami tidak lagi diperlukan dan proyek kami tidak terealisasi sepenuhnya. Meskipun ini hal yang baik, kami tidak menyangka ini akan terjadi dan tidak yakin bagaimana harus menyelesaikan aktivitas proyek kami.

Tantangan lainnya adalah bagaimana membuat agar lokakarya dan pelatihan online dapat seefektif aktivitas offline. Untuk mengupayakannya, kami menetapkan beberapa aturan dasar bagi peserta, seperti memasang dan mengaktifkan webcam selama lokakarya. Namun, ini tidak selalu memungkinkan dengan berbagai masalah koneksi internet. Oleh karena itu, tingkat interaksi peserta sulit diukur. Sebagai tindak lanjut, selain pelatihan online kami juga mengadakan kunjungan langsung, jika situasinya aman, untuk menilai seberapa besar manfaat yang dirasakan peserta dari pelatihan tersebut dan bagaimana melakukan sosialisasi online ke depannya.

Ketika melibatkan mitra masyarakat sipil lain, ada harapan yang terlalu tinggi bahwa mereka akan hadir dalam berbagai aktivitas lain setelahnya. Oleh karena itu, kolaborasi ini tidak seoptimal harapan kami, karena sebagai organisasi mereka disibukkan aktivitasnya masing-masing, meski sebenarnya ingin terlibat. Ini menyulitkan kami dalam menjadwalkan waktu yang tepat, sehingga jumlah organisasi yang terlibat tidak sebanyak yang diharapkan.

Hal yang juga perlu dicatat adalah terjadinya ancaman keselamatan ketika kantor LBH Yogyakarta diserang dengan bom Molotov pada malam hari pada bulan September. Masih belum jelas siapa pelaku atau alasannya, dan apakah insiden tersebut berkaitan dengan proyek ini atau upaya advokasi lainnya. Untungnya, tidak ada seorang pun yang terluka.

- **Bagaimana tindakan kami membantu melindungi ruang sipil (1 halaman)**

Lokakarya dilaksanakan pada akhir September 2021 dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak sipil dan politik, serta mitra masyarakat sipil yang memegang posisi strategis. Tujuan lokakarya ini adalah untuk memberikan informasi kepada peserta tentang hak-hak mereka selama pandemi, dan untuk bekerja bersama merumuskan strategi serta aktivitas advokasi yang inovatif guna mengatasi penyempitan ruang sipil selama COVID-19. Kampanye setelah lokakarya dilakukan untuk mendorong masyarakat agar mau menyuarakan hak-haknya dan menentang kebijakan yang tidak adil. Kami membuat siniar untuk menyosialisasikan informasi ini kepada lebih dari 16.000 di semua kanal media sosial LBH Yogyakarta.

Dilakukan juga aksi turun ke jalan pada hari-hari nasional yang penting, seperti Hari Petani. Aksi tersebut berguna untuk menarik perhatian ke berbagai aktivitas mitra masyarakat sipil. Banyak dari mereka yang terlibat dalam aktivitas dan aksi itu juga ikut serta dalam lokakarya kami. Aksi dilakukan pada tanggal 10 Desember dan pada hari-hari perayaan penting. Dilakukan pula aksi mingguan setiap hari Kamis. Masyarakat umumnya berkumpul di tugu, yang merupakan monumen penting di kota ini. Ada lima aksi yang telah diadakan oleh kelompok masyarakat sipil di Yogyakarta. Namun, tidak semuanya berkaitan dengan LBH atau lokakarya demokrasi. Beberapa aksi diselenggarakan oleh kelompok komunitas yang hadir dalam lokakarya demokrasi. Sulit menentukan sejauh mana lokakarya ini berkontribusi pada aksi ini. Saat kami menanyakan apakah lokakarya ini berkontribusi pada aktivitas tersebut, sebagian besar menjawab bahwa lokakarya ini sangat berperan dalam keputusan mereka mengikuti aksi. Tidak ada faktor tunggal yang membuat mereka mengikuti berbagai aktivitas lain—hanya menindaklanjuti dengan lebih terlibat pada apa yang dibicarakan dalam lokakarya. Mereka menjadi lebih siap dan berwawasan.

Kami melakukan penelitian tentang berbagai kebijakan pemerintah terkait COVID-19, khususnya bagaimana kebijakan ini memengaruhi kelompok yang rentan, seperti komunitas transgender, penyandang disabilitas, bisnis yang bergantung pada pariwisata seperti pedagang kaki lima dan pengendara ojek, serta masyarakat yang kehilangan banyak pendapatan selama pandemi tetapi tidak mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah. Penelitian dimulai pada bulan September 2021. Kami ingin menilai dampaknya pada kelompok-kelompok ini dan menganalisis bagaimana pemerintah seharusnya bertindak. Kami memeriksa undang-undang, berbagai opsi yang ada, dan tindakan yang sebenarnya

dapat diambil. Tujuan penelitian ini adalah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih strategis saat menangani COVID-19 dengan pendekatan yang saling terkait dan saling bergantung. Hasilnya diluncurkan pada tanggal 20 Desember 2021 dan telah dikirimkan kepada pemerintah setempat hingga pemerintah pusat. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia membantu mengangkat permasalahan di Yogyakarta ini ke tingkat nasional. Akan tetapi, kami belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah.

Setelah aksi protes dan aktivitas kampanye, pemerintah mengubah tindakannya dengan melonggarkan pembatasan dan menggalakkan vaksinasi. Hasilnya, masyarakat lebih menerima kebijakan pemerintah setelah sebelumnya merasa marah dan kecewa. Dengan adanya tanda-tanda peningkatan ini dan tingkat urgensinya yang makin menurun, kami merasa tidak perlu melanjutkan rencana awal kami melakukan gugatan.

- **Hasil**

- 1. Lokakarya demokrasi dan HAM dengan berbagai anggota masyarakat sipil di Yogyakarta, termasuk mahasiswa, paralegal, kelompok minoritas dan rentan (LGBT, perempuan, kelompok agama, dll.), organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, dll.**

- Kami melibatkan sejumlah organisasi masyarakat sipil di lintas sektor dan aktor dalam kegiatan ini sebagai peserta.
- Semua peserta setuju dan bersedia ambil bagian dalam berbagai aktivitas lanjutan setelah lokakarya ini, seperti pembuatan produk kampanye, penelitian kebijakan, dan upaya hukum.

- 2. Penelitian kolaboratif bersama masyarakat sipil tentang keikutsertaan masyarakat secara politis dalam perumusan kebijakan terkait penanganan COVID-19 di Yogyakarta.**

Dalam penelitian ini, kami melakukan beberapa aktivitas. Pertama, bersama-sama dengan tim dari LBH Yogyakarta, kami mengadakan berbagai kegiatan terkait isu-isu politik dalam penanganan pandemi COVID-19 di Yogyakarta. Silakan baca ikhtisar penelitian ini di catatan kaki di bawah¹.

- 3. Menyebarluaskan narasi tentang hak-hak sipil melalui siniar dan siaran online.**

-
- ¹ Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta terkait COVID (normatif), termasuk berbagai peraturan, undang-undang, serta peraturan teknis di D.I. Yogyakarta.
 - Kondisi sosiologis di lapangan, termasuk Keterbatasan Kondisi Rumah Sakit (data statistik); tenaga kesehatan yang meninggal dunia (data statistik); dan konsentrasi Pemerintah Pusat dalam menangani pandemi yang hanya terpusat di Jawa-Bali.
 - Kondisi-kondisi khusus D.I. Yogyakarta: mayoritas populasi D.I. Yogyakarta berpenghasilan rendah dan mengandalkan industri pariwisata (statistik pemerintah); siapa yang paling terdampak dan bagaimana nasib kelompok yang rentan? (Masyarakat yang terdampak dan kelompok yang rentan akan melakukan wawancara dengan perwakilan dari komunitas Bentor (transportasi umum tradisional di Indonesia), Waria, dan Pekerja Seks)
 - Analisis Politik Hukum Pemerintah D.I. Yogyakarta dan rekomendasi dalam penanganan COVID.

Platform yang kami gunakan adalah sosial media LBH Yogyakarta. Kami juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana pemerintah menangani pandemi. Kami membuat dua siniar dengan pihak-pihak yang terdampak oleh COVID-19 atau yang prihatin dengan penanganan pandemi.

1. [Podcast Saksi: Memperjuangkan Kebebasan Akademik di Kampus UP 45 Yogyakarta di Masa Pandemi](#)
2. [Podcast Saksi: Hampir 2 Tahun Pandemi, Sudahkah Efektif Kebijakan Penanganan Pandemi?](#)

Indikator:

1. **Rencana kerja untuk advokasi gabungan yang disetujui oleh setidaknya 15 aktor strategis dari masyarakat sipil Yogyakarta telah tercapai.**

Setelah lokakarya, masyarakat sipil Yogyakarta sepakat untuk membuat rencana kerja untuk upaya advokasi yang mencakup penelitian, kampanye, dan gugatan warga. Untuk menindaklanjuti rencana kerja ini, kami telah mengunjungi pihak-pihak yang mengikuti lokakarya. Kami berharap perubahan yang kami inginkan dalam program ini tidak hanya berjalan berdasarkan rencana, tetapi juga secara organik. Kami berharap setiap anggota masyarakat dapat saling membantu lewat advokasi ini atau saat mereka berhadapan dengan represi dari pemerintah.

- 2) **Hasil penelitian dikirimkan ke pemerintah daerah Yogyakarta dalam bentuk risalah kebijakan (*policy brief*) sebagai tinjauan yang menawarkan cara alternatif untuk menangani pandemi.**

Ini telah tercapai dengan penelitian yang kami lakukan dan hasilnya telah kami publikasikan kepada masyarakat (<https://www.youtube.com/watch?v=9AhFHtFkE44>). Kami juga telah mengirimkan hasil penelitian ini kepada pemerintah. Indikator kedua, bagian B, telah tercapai dengan menyiarkan dua siniar di kanal YouTube LBH Yogyakarta. Selain itu, siniar ini juga disiarkan di media sosial LBH Yogyakarta dan AJI Yogyakarta:

- [https://www.instagram.com/reel/CWkpuagrr1/?utm_source=ig_web_copy link;](https://www.instagram.com/reel/CWkpuagrr1/?utm_source=ig_web_copy_link)
- [https://www.instagram.com/p/CXOB0HbPiss/?utm_source=ig_web_copy link;](https://www.instagram.com/p/CXOB0HbPiss/?utm_source=ig_web_copy_link)
- [https://www.instagram.com/p/CXOL-z1PpVw/;](https://www.instagram.com/p/CXOL-z1PpVw/)
- [https://www.instagram.com/p/CXodXL_vV6J/?utm_source=ig_web_copy link;](https://www.instagram.com/p/CXodXL_vV6J/?utm_source=ig_web_copy_link)
- [https://www.instagram.com/p/CXnF1yhLBpM/?utm_source=ig_web_copy link.](https://www.instagram.com/p/CXnF1yhLBpM/?utm_source=ig_web_copy_link)

b) Ada narasi balasan tentang penanganan pandemi pemerintah dari setidaknya dua media arus utama dan disiarkan oleh media sosial LBH Yogyakarta dan media yang dikelola oleh masyarakat sipil.

- Pemerintah menanggapi narasi balasan yang kami buat dan penelitian yang kami lakukan. Tanggapan ini diberikan lewat forum dengar pendapat dengan pemerintah, yaitu bahwa mereka tengah melakukan perbaikan dengan berbagai peraturan baru terkait penanganan pandemi. Meskipun rancangan peraturan tersebut belum kami peroleh, ini dapat menjadi momentum bagi kami untuk melakukan intervensi dan memastikan materi dalam rancangan peraturan tersebut selaras dengan prinsip HAM dan aturan hukum (*rule of law*). Berikut tautan ke peraturan baru yang sedang dibuat:
- <https://jogja.suara.com/read/2021/10/20/130320/diy-siap-terapkan-perda-penanggulangan-covid-19-ini-sanksi-bagi-pelanggar-prokes?page=all>
- <https://jogja.tribunnews.com/2021/10/24/siap-siap-diy-bakal-punya-perda-tentang-covid-19-langgar-prokes-denda-rp250-ribu>.

3) Gugatan warga.

Dalam empat bulan terakhir proyek ini, belum ada satu pun tindakan represi terhadap aktivitas masyarakat sipil (berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dan penelitian media). Banyak aksi protes yang telah dilakukan oleh jaringan masyarakat sipil LBH Yogyakarta. Setelah aksi-aksi tersebut terjadi, tidak ada represi atau larangan dari pemerintah.

Kutipan dan visual (½ halaman).

- “Menurut saya, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara terkait hak asasi manusia selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa negara lalai dan tidak tanggap dalam menangani wabah ini, mulai dari kebijakan yang sewenang-wenang dan tidak memprioritaskan aspek-aspek populis hingga restorasi kesehatan masyarakat yang tidak tercapai.” – *Dila Farhani Nurrahman, disampaikan saat lokakarya.*
- “Kerentanan komunitas transgender adalah akibat dari tindakan kelompok arus utama dengan stigma LGBT yang dilakukan secara besar-besaran. Kondisi ini makin parah dengan adanya pandemi. Ini membuat kaum transpuan tidak dapat melakukan aktivitas mereka karena mayoritas bekerja sebagai pekerja seni jalanan dan pekerja seks. Kelompok transpuan juga tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena identitas mereka sebagai transpuan. Negara tidak dapat memfasilitasi identitas mereka (secara administratif) dan tidak ada kemauan politik dari pemerintah. Pada akhirnya, yang terjadi adalah masyarakat bahu membahu dan membuka donasi.” – *Mami Rully, Yayasan Kebaya.*

- “Lokakarya ini penting dan bermanfaat, dan mereka juga terlibat dalam beragam aktivitas secara internal dengan membagikan lokakarya ini kepada anggota organisasinya yang lain maupun kepada masyarakat. Lalu, mereka mulai ikut serta dalam latihan pemetaan persoalan dan masalah serta merencanakan berbagai aktivitas advokasi. Kemudian, mereka pun melaksanakan rencana ini. Begitulah yang dikatakan oleh peserta kepada kami.” *Yogi, LBH Yogyakarta*

Rencana ke depan

Kami selalu siap berinteraksi dengan pihak-pihak yang tertarik, termasuk mitra-mitra lain dalam proyek ini. Kami akan berkomunikasi dengan mitra-mitra setempat, khususnya dengan adanya kemungkinan bahwa pembatasan serupa akan kembali diberlakukan, dan kami ingin mencegah hal ini terjadi lagi. Kami selalu mengharapkan kerja sama dalam bentuk apa pun, dan kami dapat menghubungkan mitra internasional dengan mitra setempat. Yang dapat kami kerjakan sangat bergantung pada situasi setempat. Akan sangat bermanfaat jika kami dapat membicarakan tentang apa yang dapat kami lakukan ke depannya.

Panggilan aksi

Kami sangat terbuka dan ingin agar siapa pun yang memegang nilai, visi, dan misi yang sama dengan kami untuk terlibat dan memberikan dukungan dalam melaksanakan proyek ini. Silakan hubungi kami melalui office@lbhyogyakarta.org atau dengan mengunjungi [Homepage - LBH Yogyakarta](#).

